

**Analisis Literatur Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung**

Silla Anantasya Choirul Nisa¹, Taufiqurrohman²

Pascasarjana Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
silla.anantasya@student.umj.ac.id, taufiqurokhman@umj.ac.id

ABSTRACT

This study expects to assess supportable the travel industry arrangements in the Tanjung Lesung Exceptional Financial Zone (SEZ). A literature review is the approach that is taken, and it involves gathering, analyzing, and combining data from various relevant literature sources. The outcomes demonstrate that economical the travel industry approaches in the Tanjung Lesung SEZ center around foundation improvement, natural safeguarding, and nearby local area strengthening. However, there are still some obstacles, such as a lack of infrastructure to support the project, inadequate community involvement, and issues with stakeholders' coordination. In conclusion, further efforts to improve infrastructure, the quality of facilities, community participation, and stakeholder coordination are required to achieve sustainable tourism goals in the Tanjung Lesung SEZ.

Keywords: Sustainable Tourism; Special Economic Zone; Tanjung Lesung

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menilai kewajaran strategi industri pariwisata di KEK Tanjung Lesung. Metodenya adalah studi literatur, yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan penggabungan data dari berbagai sumber perpustakaan yang relevan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengaturan industri pariwisata di KEK Tanjung Lesung berpusat pada peningkatan kerangka kerja, pelestarian alam, dan penguatan jaringan lingkungan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya infrastruktur pendukung, keterlibatan masyarakat yang belum optimal, dan masalah koordinasi antar *stakeholder*. Kesimpulannya, untuk mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan di KEK Tanjung Lesung, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan infrastruktur, kualitas sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antar *stakeholder*.

Kata kunci: Pariwisata Berkelanjutan; Kawasan Ekonomi Khusus, Tanjung Lesung

PENDAHULUAN

Industri pariwisata merupakan sektor penting bagi perekonomian Indonesia, dengan 11,68 juta wisatawan asing muncul pada tahun 2023, meningkat sebesar 98,3 persen dibandingkan tahun 2022 (Halim, 2024). Pada tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat ke-42 dalam *Travel and Tourism Competitiveness Index* (TTCI) *World Economic Forum*. Indonesia ingin menduduki peringkat 30 dunia pada tahun 2019. Peningkatan penilaian terhadap pilar kelestarian lingkungan yang masih menduduki peringkat 131 dari 136 negara menjadi salah satu upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, pembangunan pariwisata berkelanjutan juga berperan penting dalam pemerataan peluang usaha, mendorong pembangunan nasional, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pariwisata juga membuat masyarakat semakin sadar dan bangga terhadap budaya dan sumber daya alam yang dimiliki negaranya. Provinsi Banten salah satunya dan memiliki banyak potensi pariwisata, seperti pantai, perairan, sejarah dan budaya, serta cagar alam. Di pesisir Barat Banten, fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan *cottage* tersebar luas.

Presiden Republik Indonesia secara tradisional menetapkan Tanjung Lesung di Pandeglang, Banten sebagai salah satu "Bali Baru". Tanjung Lesung yang terletak di Pulau Jawa Barat merupakan bagian penting bagi kawasan Banten dengan karakter daratannya yang luar biasa menjadi daya tarik tersendiri. Pada tahun 2018, tsunami melanda Pesisir Teluk Selat Sunda di Provinsi Banten, menghancurkan industri pariwisata secara fisik, finansial, dan investasi. Kerusakan parah terjadi di Tanjung Lesung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan tujuan wisata populer. Sebagai KEK yang menitikberatkan pada pergantian peristiwa yang objektif dan spekulasi publik mengenai industri pariwisata, dengan slogan "*Passage to Experience in West Edge of Java*", pemerintah percaya bahwa Tanjung Lesung dapat lebih mengembangkan bantuan pemerintah daerah serta pembayaran teritorial dan fokus. . Pasca bencana gelombang, pemerintah berupaya memulihkan kondisi industri pariwisata di Tanjung Lesung (Haniah & Setiawati, 2022).

DATA PENGUNJUNG TANJUNG LESUNG TAHUN 2018 sd 2023												
Bulan Kunjungan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kunjungan Th 2018	51,222	78,470	117,420	162,280	201,641	411,855	470,862	509,637	725,976	764,068	806,056	926,748
Kunjungan Th 2019	20,256	33,582	55,450	82,941	120,120	142,668	230,421	278,064	445,214	473,108	510,458	569,430
Kunjungan Th 2020	66,412	73,979	78,470	79,760	80,795	82,695	84,695	128,030	182,600	252,600	381,500	495,200
Kunjungan Th 2021	58,222	69,010	74,010	79,500	83,500	86,050	87,030	88,530	115,504	145,520	200,525	285,325
Kunjungan Th 2022	68,875	75,375	83,527	87,521	101,513	121,562	171,538	195,652	286,654	400,262	451,036	539,253
Kunjungan Th 2023	78.271	84.235	99.051	149.798	162.381	213.638	325.713	431.243	575.347	710.322	829.233	938.122

Gambar 1. Data Pengunjung Tanjung Lesung Tahun 2018-2023

Melihat gambaran di atas, dapat beralasan jika informasi wisatawan ke Tanjung Lesung dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang sangat besar karena berbagai variabel, termasuk kejadian bencana dan pandemi virus Corona. Pada tahun 2018, jumlah kunjungan meningkat secara bertahap, dimulai dengan 51,222 pengunjung di bulan Januari dan mencapai puncaknya dengan 926,748 pengunjung di bulan Desember, meskipun terjadi bencana alam di akhir tahun yang mungkin mempengaruhi kunjungan akhir tahun tersebut.

Pada tahun 2019, terlihat penurunan drastis pada awal tahun dengan hanya 20,256 pengunjung di bulan Januari. Meskipun ada peningkatan setiap bulannya, jumlah pengunjung tetap lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 569,430 pengunjung di bulan Desember. Tahun 2020 dimulai dengan jumlah

pengunjung yang cukup tinggi, namun dampak pandemi COVID-19 mulai terlihat pada bulan Maret, dengan penurunan signifikan dalam jumlah pengunjung. Meski demikian, mulai paruh kedua tahun, jumlah pengunjung mulai meningkat kembali, mencapai 495,200 pengunjung di bulan Desember.

Pada tahun 2021, jumlah kunjungan tetap rendah pada awal tahun akibat pandemi, tetapi ada tren peningkatan yang stabil sepanjang tahun, dengan 285,325 pengunjung di bulan Desember. Angka kunjungan tetap lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum pandemi. Tahun 2022 menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan peningkatan jumlah pengunjung setiap bulannya, mencapai 539,253 pengunjung di bulan Desember, mendekati angka kunjungan tahun 2019 sebelum pandemi. Peningkatan jumlah pengunjung setiap bulan menunjukkan pemulihan yang stabil dari dampak pandemi.

Dengan 938,122 pengunjung pada bulan Desember, tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dari bulan ke bulan, yang menunjukkan pemulihan yang kuat dan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa industri pariwisata Tanjung Lesung telah bangkit dari kesulitannya bahkan berkembang. Data ini menggambarkan bagaimana bencana alam dan pandemi dapat mempengaruhi pariwisata, tetapi juga menunjukkan kemampuan untuk pulih dan tumbuh kembali dengan kondisi yang lebih baik.

Namun pada kenyataannya, Pemerintah Provinsi Banten melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan kabupaten/kota dinilai kurang serius dalam mengelola dan mengevaluasi potensi pariwisata yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat. Ahmad Yani, pemerhati budaya dan pariwisata Banten, mengatakan wisatawan sering kali dikecewakan dengan promosi produk pariwisata yang berlebihan dan tidak jelas menunjang ketersediaan dan kualitasnya. Contohnya, banyak produk wisata dipromosikan dengan tampilan media yang menarik, namun tidak memperhatikan ketersediaan dan kualitasnya. Hal ini menyebabkan kekecewaan karena obyek wisata yang dikunjungi masih minim sarana dan prasarana, kesenian tradisional yang tidak tersedia, makanan khas yang sulit ditemukan, harga yang mahal, jalan rusak, dan pelayanan yang kurang ramah. Oleh karena itu, kecil kemungkinan pengunjung untuk kembali atau merekomendasikan lokasi tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, pemerintah dan *stakeholder* pariwisata di Banten perlu segera memperbaiki masalah ini (Mulyana, 2023).

Dari uraian permasalahan penelitian di atas, dimana masih terdapat kekurangan perhatian dari pemerintah mengenai KEK Tanjung Lesung, maka rumusan penelitian ini adalah a). Bagaimana kebijakan pariwisata berkelanjutan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, dan b. Hambatan apa saja yang menghambat implementasi kebijakan pembangunan KEK? Kemudian kajian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan kebutuhan pendekatan tersebut dalam pengelolaan industri pariwisata di Kawasan Keuangan Unik (KEK) Tanjung Lesung, Banten.

1. Pariwisata Berkelanjutan

Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata berkelanjutan telah menjadi perhatian utama dalam perencanaan destinasi serta kebijakan regional dan nasional.

Industri pariwisata telah mengambil sejumlah pendekatan berbeda terhadap keberlanjutan sebagai akibat dari masalah ini. Buku-buku yang berkaitan dengan industri perjalanan yang berkelanjutan telah diterbitkan dalam jumlah besar selama beberapa tahun terakhir, dengan banyak pertemuan di seluruh dunia setiap tahun yang menampilkan industri perjalanan sebagai konsentrasi fokus (Edgel et al., 2008: 332). Kode Etik Pariwisata Global dikembangkan oleh Organisasi Pariwisata Dunia (WTO), dan menekankan pentingnya mengembangkan pariwisata ramah lingkungan dan beretika yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dua belas tujuan utama pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Meskipun pertimbangan di seluruh dunia telah terpusat pada mendukung industri perjalanan dan dampaknya yang besar, definisi dan operasionalisasi industri perjalanan yang layak masih menghadapi tantangan berat, dengan adanya pergeseran pemahaman dari berbagai aliran skolastik dan asosiasi global (Berno dan Bricker, 2001). Menurut PBB, wajar industri perjalanan dicirikan sebagai kegiatan industri perjalanan yang mengawasi aset secara efektif untuk memenuhi persyaratan keuangan, sosial dan gaya, dan menjaga kepercayaan sosial, lingkungan dan keanekaragaman hayati yang mendasar (UNEP dan WTO, 2005). Lankford dan Lankford (2000) menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan, pembangunan, dan manajemen pariwisata, serta perlunya edukasi bagi wisatawan dan masyarakat lokal tentang pentingnya perlindungan habitat satwa liar, efisiensi energi, dan penggunaan transportasi yang ramah lingkungan.

2. Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan

Institusi dan organisasi lokal, regional, nasional, dan supranasional dapat menggunakan kebijakan pariwisata untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata. Ada dua jenis strategi industri perjalanan, yaitu pengaturan utama dan tambahan, yang dapat dilaksanakan pada tingkat skala penuh dan miniatur (Vucetic, 2008). Strategi industri pariwisata sering kali rumit, cepat berubah, dan pada dasarnya mempengaruhi iklim, sehingga bisa jadi bersifat dinamis, kejam, dan sengit (Stevenson dkk., 2008). Saat ini, strategi industri perjalanan yang masuk akal menjadi penting, di mana metodologinya berpusat pada menjaga sifat produk industri perjalanan dalam jangka waktu yang ekonomis, untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri dan global agar pengalaman industri pariwisata tetap berkelanjutan.

Masyarakat dapat mengendalikan dan menyesuaikan iklim, yang dapat memperbaiki atau menghancurkan sudut pandang tertentu. Oleh karena itu, tanpa resep strategi yang hati-hati dan aparat administrasi yang tepat, industri perjalanan dapat menyebabkan kerusakan ekologis dan menghilangkan nilai-nilai yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di masa depan (Edgel et al., 2008: 192). Selain itu, Goldner dan Ritchie (2006: 405) menyatakan bahwa strategi industri perjalanan mencakup pedoman, aturan, aturan, bantalan, serta target perbaikan dan teknik yang memberikan suatu sistem pada dinamika individu dan agregat yang secara langsung berdampak pada kemajuan industri perjalanan dalam suatu jangka waktu tertentu, serta mengawasi pelaksanaan fungsional di keberatan industri pariwisata.

METODE PENELITIAN

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang meliputi serangkaian latihan seperti mengumpulkan informasi perpustakaan, meneliti, mencatat dan memantau data secara sadar, sistematis dan mendasar tentang Strategi Industri Pariwisata yang Layak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Perencanaan penelitian sama seperti eksplorasi lainnya, namun perhatiannya tertuju pada pengumpulan informasi dari tulisan, artikel penelitian, serta teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan faktor-faktor yang diteliti. Instrumen penelitian ini akan melibatkan analisis literatur dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memilih literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pengolahan data mencakup pengumpulan dan pengorganisasian temuan literatur, dengan ekstraksi informasi yang relevan seperti temuan penelitian dan metode yang digunakan. Analisis data akan bersifat deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam hubungan antara niat untuk tinggal, komitmen organisasional, keseimbangan kehidupan kerja, dan kepuasan kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, yang berada di pesisir barat Provinsi Banten, Indonesia, diinisiasi sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mengembangkan potensi pariwisata secara berkelanjutan. Kebijakan pariwisata berkelanjutan di Tanjung Lesung bertujuan untuk menyatukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan ini. Kawasan ini dipilih karena keindahan alamnya yang meliputi pantai berpasir putih, terumbu karang yang beragam, serta keberagaman budaya lokal yang kaya.

Sehubungan dengan kemajuan industri perjalanan di Indonesia, penerimaan etos dan standar ekonomi kemajuan industri pariwisata diperintahkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menyatakan bahwa penyelenggaraan industri perjalanan wisata di Indonesia bergantung pada peraturan yang sesuai dengan etos dan standar kelayakan kemajuan industri perjalanan wisata. Bab II Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan kemaslahatan, kekeluargaan, keadilan dan kesetaraan, keseimbangan, kemandirian, keberlanjutan, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan persatuan merupakan asas penyelenggaraan pariwisata Indonesia. Selain itu, Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2009 juga memerintahkan agar penyelenggaraan industri perjalanan di Indonesia harus didasarkan pada perspektif yang menggabungkan etos dan standar pengelolaan (Widari, 2020).

Pemerintah Indonesia melihat KEK Tanjung Lesung sebagai peluang untuk menarik investasi dalam sektor pariwisata sambil menjaga keberlanjutan lingkungan. Strategi utama kebijakan pariwisata di kawasan ini mencakup pengembangan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pariwisata, termasuk transportasi, akomodasi, dan fasilitas umum. Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Tanjung Lesung sebagai destinasi wisata yang kompetitif secara global, sambil memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal (Komala, 2015).

Salah satu bagian penting dari pendekatan ini adalah upaya untuk melindungi iklim. Kemajuan besar seperti pengelolaan sampah, pemeliharaan kerapian tepi laut, dan perlindungan terumbu karang merupakan bagian penting dari kemungkinan sistem peningkatan industri pariwisata di Tanjung Lesung. Pemerintah dan pemangku kepentingan di wilayah tersebut berupaya keras untuk memastikan bahwa perluasan pariwisata tidak merusak ekosistem yang sudah ada, namun memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah tersebut dalam jangka panjang. Selain itu, strategi ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan jaringan lingkungan melalui keterbukaan keuangan yang dilakukan oleh industri perjalanan. Tujuan dari program pelatihan dan pengembangan keterampilan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan industri pariwisata masyarakat setempat agar dapat lebih berpartisipasi dalam nilai tambah perekonomian KEK Tanjung Lesung (Qolbi & Yudhi, 2018).

Komitmen terhadap prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan Indonesia tercermin dalam implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di KEK Tanjung Lesung. Melalui undang-undang ini, pemerintah Indonesia tidak hanya memberikan pedoman pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, tetapi juga mendorong pelestarian warisan budaya dan alam yang menjadi daya tarik utama destinasi wisata. Dengan demikian, KEK Tanjung Lesung menjadi salah satu contoh bagaimana prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kepariwisataan diimplementasikan dalam praktik nyata, menghadirkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal dan pengunjung, sambil memastikan bahwa sumber daya alam yang ada tetap terjaga untuk generasi mendatang. Secara umum, dukungan strategi industri perjalanan di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung mencerminkan kewajiban pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasikan kemajuan keuangan dengan perlindungan alam dan penguatan sosial (UU Kepariwisata No. 10 Tahun 2009, PU Nomor 41 Tahun 2007 dan PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Alam). Oleh karena itu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung diharapkan menjadi model global pembangunan pariwisata berkelanjutan..

Dalam melaksanakan strategi pengembangan KEK Tanjung Lesung, terdapat beberapa hambatan penting yang mempengaruhi upaya mencapai tujuan praktis industri perjalanan di wilayah tersebut. Pertama, salah satu kendala utama adalah kurangnya infrastruktur pendukung seperti jalan raya yang memadai dan akses transportasi yang memadai dari luar kawasan. Hal ini membuat sulit bagi wisatawan untuk mencapai Tanjung Lesung dengan nyaman dan aman, menghambat potensi pertumbuhan kunjungan wisata.

Kedua, masalah yang signifikan adalah terbatasnya sarana dan prasarana penunjang wisata seperti akomodasi, tempat makan, dan fasilitas umum lainnya. Meskipun ada upaya dari masyarakat lokal dalam menyediakan fasilitas penginapan seperti villa atau rumah sewa, namun masih perlu peningkatan dalam jumlah dan kualitasnya agar dapat mengakomodasi jumlah wisatawan yang meningkat. Selanjutnya, kendala lainnya adalah keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam pengelolaan dan promosi pariwisata Tanjung Lesung. Terlepas

dari kenyataan bahwa telah ada upaya untuk melibatkan daerah setempat yang sedang dikembangkan dan dewan, kemajuan lebih lanjut masih diharapkan untuk membangun kesadaran dan kontribusi dinamis mereka, baik dalam menjaga iklim dan dalam mengawasi organisasi industri pariwisata. Selain itu, permasalahan lingkungan seperti kebersihan pantai, kelestarian terumbu karang, dan pengelolaan sampah juga menjadi kendala serius. Peningkatan jumlah pengunjung tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai dapat mengancam keberlanjutan ekosistem alam Tanjung Lesung yang menjadi daya tarik utama wisata (DKP Kabupaten Pandeglang, 2016).

Kendala yang terakhir adalah permasalahan regulasi dan koordinasi pemangku kepentingan. Pembangunan dan pengembangan KEK Tanjung Lesung melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, pimpinan industri pariwisata dan jaringan masyarakat, namun sering kali koordinasi dan harmonisasi strategi dan kebijakan masih menjadi ujian tersendiri yang dapat menghambat kemajuan pariwisata. perbaikan industri.

Dalam konteks ini, untuk mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan di Tanjung Lesung, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan infrastruktur, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, memperkuat pengelolaan lingkungan, serta memperbaiki koordinasi antar *stakeholder*. Hanya dengan mengatasi kendala-kendala ini, KEK Tanjung Lesung dapat benar-benar menjadi destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi rekomendasi dan kesimpulan di sini. kesimpulan dari tanggapan yang diperoleh terhadap hipotesis, tujuan penelitian, atau temuan. Keputusan tersebut tidak memuat hasil dan perbincangan yang berlebihan, namun lebih merupakan ikhtisar penemuan-penemuan yang sesuai dengan tujuan atau spekulasi. KEK Tanjung Lesung yang terletak di tepi barat Wilayah Banten, Indonesia, merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan industri pariwisata dengan cara yang berkelanjutan. Dengan keindahan alamnya yang meliputi pantai berpasir putih, terumbu karang yang beragam, dan keberagaman budaya lokal, KEK Tanjung Lesung dipilih sebagai destinasi utama untuk menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaannya.

Kebijakan pariwisata berkelanjutan di Tanjung Lesung didasarkan pada UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang mewajibkan adopsi prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melihat KEK Tanjung Lesung sebagai peluang untuk menarik investasi dalam sektor pariwisata sambil mempertahankan kelestarian lingkungan. Strategi utama kebijakan mencakup pengembangan infrastruktur seperti transportasi dan akomodasi guna meningkatkan daya tarik global Tanjung Lesung sebagai destinasi pariwisata. Pentingnya menjaga lingkungan tercermin dalam upaya konkret seperti pengelolaan limbah, kebersihan pantai, dan pelestarian terumbu karang. Selain itu, kebijakan ini menekankan pemberdayaan masyarakat lokal melalui peluang ekonomi

yang diciptakan oleh pariwisata, dengan program pelatihan dan pengembangan keterampilan.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan di KEK Tanjung Lesung dihadapkan pada sejumlah kendala signifikan. Kurangnya infrastruktur pendukung seperti jalan dan transportasi yang memadai serta keterbatasan sarana dan prasarana pariwisata menjadi tantangan utama. Selain itu, partisipasi masyarakat dan koordinasi antar *stakeholder* masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan yang diharapkan. Secara keseluruhan, KEK Tanjung Lesung menjadi contoh bagaimana prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kepariwisataan diimplementasikan dalam praktik nyata, menghadirkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal dan pengunjung, sambil memastikan bahwa sumber daya yang tersedia tetap terjaga untuk generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Berno, T., & Bricker, K. (2001). Sustainable Tourism Development: The Long Road from Theory to Practice. *International Journal of Economic Development*, 3(3), 1-18. <http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v14i3.873>
- DKP Kabupaten Pandeglang. (2016). *UU Kepariwisata No. 10 Tahun 2009*
- Edgel, D. L., Allen, M. D., Smith, G., & Swanson, J. R. (2008). *Tourism Policy and Planning Yesterday, Today and Tomorrow*. Oxford: Elsevier.
- Goeldner, C. R., & Ritchie, B. J. R. (2006). *Tourism, Principles, Practices, Philosophies* (Ninth Ed.). New Jersey: Wiley & Sons.
- Halim, A. (2024). Pentingnya prinsip pariwisata berkelanjutan untuk Indonesia. Retrieved from <https://www.sbm.itb.ac.id/id/2024/04/29/pentingnya-prinsip-pariwisata-berkelanjutan-untuk-indonesia/>
- Haniah, N., & Setiawati, S. D. (2022). Analisis festival Tanjung Lesung dalam upaya meningkatkan wisatawan pasca tsunami. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 5(2), 428-4314. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i2.4314>
- Komala, I. (2015). Implementasi Kebijakan dan kendala pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata tanjung lesung kabupaten pandeglang provinsi banten. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Lankford, J. K., & Lankford, S. V. (2000). Tourism and Sustainability: Can They Be Partners? *Journal of World Leisure*, 42, 4-10. <http://doi.org/10.1080/04419057.2000.9674181>
- Mulyana. (2023). Pemprov Banten dinilai belum serius kelola potensi pariwisata. Retrieved from <https://banten.antaranews.com/berita/257790/pemprov-banten-dinilai-belum-serius-kelola-potensi-pariwisata>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung

Permen PU No. 41 Tahun 2007

Qolby, F & Yudhi A, K. (2018). Arahan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Tanjung Lesung Berdasarkan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Teknik ITS*. Vol 7(1).

Stevenson, N., Airey, D., & Miller, G. (2008). Tourism Policy Making: The Policymakers' Perspectives. *Annals of Tourism Research*, 35, 732-750. <http://doi.org/10.1016/j.annals.2008.05.002>

UNEP & WTO. (2005). *Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policymakers*. Madrid: UNEP & WTO.

UU Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009

Vucetic, A. (2008). Impact of Tourism Policy on Development of Selective Tourism. *Selective Tourism*, 4-17. Retrieved from <http://doi.org/10.2139/ssrn.3166309>

Widari, D. A. D. S. (2020). Kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan: Kajian teoretis dan empiris. *Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata (JKTP)*, 1(1). <https://doi.org/10.2747/jktp.1.1>.